

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa degradasi lingkungan di Delta Mekong bukanlah fenomena netral, melainkan sebuah krisis yang dampaknya secara tidak proporsional ditanggung oleh perempuan. Akar masalah ini terletak pada paradigma pembangunan yang bersifat top-down dan teknokratis, yang memprioritaskan proyek infrastruktur skala besar seperti bendungan dan sistem irigasi tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologis. Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan masif yang termanifestasi dalam bentuk intrusi air asin, abrasi lahan, dan penurunan kualitas air secara drastis. Perspektif ekofeminisme secara tajam mengungkap bahwa eksploitasi alam ini berjalan paralel dengan subordinasi terhadap perempuan, karena keduanya berasal dari struktur kekuasaan patriarkal yang sama. Dengan demikian, kebijakan yang secara sistematis mengabaikan partisipasi dan pengetahuan ekologis perempuan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga melanggar ketidakadilan gender yang mendalam.

Dampak dari krisis ekologis ini dirasakan perempuan secara multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan. Secara ekonomi, mereka kehilangan mata pencaharian di sektor pertanian dan perikanan, yang memaksa mereka bermigrasi ke sektor informal yang rentan eksploitasi dan meningkatkan ketergantungan ekonomi. Secara sosial, perempuan menghadapi peningkatan beban kerja domestik untuk mencari sumber daya langka seperti air bersih, terkikisnya jejaring sosial akibat migrasi, serta tekanan psikososial yang berat. Dari sisi kesehatan, krisis air bersih dan kontaminasi lingkungan meningkatkan risiko penyakit menular serta gangguan kesehatan reproduksi, menjadikan tubuh perempuan sebagai arena manifestasi ketidakadilan lingkungan. Akumulasi dampak ini menegaskan adanya fenomena "marginalisasi ganda," di mana identitas gender bersinggungan dengan status kelas ekonomi dan etnisitas, sehingga memperdalam jurang kerentanan perempuan.

Meskipun menanggung beban yang berat, penelitian ini menemukan bahwa perempuan di Delta Mekong bukanlah korban pasif, melainkan agen adaptif yang aktif merespons krisis. Melalui pengetahuan ekologis lokal, mereka menginisiasi praktik pertanian berkelanjutan, membentuk kelompok pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, dan menjadi penjaga ketahanan pangan keluarga. Namun, inisiatif dari akar rumput ini seringkali terhambat oleh kebijakan yang tidak mendukung dan terbatasnya akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu, solusi yang berkelanjutan tidak dapat bersifat teknis semata, tetapi harus berlandaskan pada transformasi relasi kuasa yang lebih adil. Pada akhirnya, mewujudkan keadilan lingkungan di Delta Mekong menuntut pengakuan dan pemberdayaan perempuan sebagai aktor sentral dalam tata kelola sumber daya dan perumusan kebijakan adaptasi.

